

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1. Kesimpulan

Kawasan Arktik mulai berkembang sebagai wilayah yang strategis dan krusial seiring dengan proses mencairnya es akibat perubahan iklim. Hal ini dilihat sebagai potensi bagi berbagai negara khususnya AS yang mendapatkan legitimasinya di Arktik melalui Alaska. Kepentingan AS di Arktik mencakup isu eksplorasi migas, kebebasan navigasi atau FONOP, jalur pelayaran alternatif baru melalui NSR dan Northwest Passage, hingga perpanjangan wilayah laut teritorial berdasarkan *Continental Shelf*. Kendati demikian, peluang AS mendapatkan potensi ini jauh lebih kecil dibandingkan negara Arktik lainnya sehingga AS selalu berlindung dalam kepentingan FONOP dan Arktik sebagai bagian dari perairan internasional sekaligus kestabilan kawasan sebagai zona perdamaian.

Sejak pemerintahan Obama II hingga Trump, AS memiliki beberapa dokumen kebijakan di Arktik yakni *National Strategy for the Arctic Region 2013* (NSAR-2013), *2016 Arctic Strategy dan Department of Defense* (DOD 2016) serta *2019 Arctic Strategy Department of Defense* (DOD 2019) di era Trump. Kebijakan AS di Arktik mengalami perubahan dari pro-aktif-inklusif di era Obama II menjadi kompetitif dan konfrontatif di era Trump. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya perubahan di lingkungan eksternal yakni pengaruh China dan Russia, persepsi mengenai perubahan iklim di Arktik, serta persepsi mengenai NSR dan Northwest Passage. Perubahan di lingkungan internal dipengaruhi oleh peran pakar, dukungan Kongres dan Senat, serta prioritas kebijakan AS yang dipengaruhi oleh kepentingan partai yang berkuasa. Selain itu, terdapat juga peran individu dalam hal ini Obama dan Trump sebagai pemangku kebijakan tertinggi AS yang memiliki latar belakang, pandangan, persepsi, serta pendekatan yang berbeda selama masa pemerintahannya.

Hasil penelitian dengan rumusan masalah **‘Bagaimana perbedaan model kebijakan luar negeri AS terhadap kawasan Arktik di era Obama II dan Trump?’** ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan kebijakan luar negeri AS terhadap kawasan Arktik di era Obama II dan Trump. Terdapat beberapa poin penting yang menjadi faktor penentu dari perbedaan kebijakan luar negeri Arktik-AS di era Obama II dan Trump, yakni:

1. Penggunaan instrumen kebijakan luar negeri melalui Arctic Council di era Obama II dan kapabilitas militer khususnya kapal pemecah es di era Trump.
2. Persepsi mengenai prioritas isu perubahan iklim.
3. Faktor internal mencakup latar belakang presiden, partai pendukung, serta dukungan dari Kongres dan Senat.
4. Persepsi mengenai ancaman China dan Russia.

Baik kebijakan Arktik-AS di era Obama II dan Trump merupakan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan di lingkungan internal dan eksternalnya. Namun, perbedaan terlihat dari penggunaan Arctic Council dan kapabilitas militer khususnya kapal pemecah es sebagai instrumen kebijakan luar negerinya.

Kebijakan Arktik-AS di pemerintahan Obama II mengacu pada *National Strategy for the Arctic Region 2013* (NSAR-2013). NSAR-2013 menegaskan bahwa AS adalah negara Arktik sehingga banyak membahas bagaimana AS mempersepsikan kawasan Arktik sebagai zona perdamaian dan bebas konflik. Strategi kebijakan pemerintah Obama II dalam isu Arktik merupakan *Preservative Adapt* sebab berhasil merespon perubahan di lingkungan internal dan eksternal pada saat itu melalui dokumen strategi NSAR-2013, peran aktif AS di Arctic Council, serta menjaga hubungan diplomatis dan mendorong kerjasama dengan negara Arktik lainnya dalam isu lingkungan, penelitian ilmiah, kesejahteraan, serta pembangunan di Arktik. Kendati demikian, pemerintahan Obama II gagal untuk menggunakan kapabilitas militernya di Arktik terutama dalam pengadaan kapal pemecah es sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang penting dalam mencapai kepentingan komersil dan keamanan kawasan bagi aliansi negara NATO-nya.

Strategi Arktik-AS di pemerintahan Trump mengacu pada 2 dokumen strategi, yakni 2016 *Arctic Strategy Department of Defense* dan 2019 *Arctic Strategy Department of Defense*. Kedua strategi di era Trump ini melihat Arktik sebagai arena kompetisi strategis serta berfokus bagaimana AS merespon perubahan kondisi geopolitik Arktik seiring isu mencairnya es akibat perubahan iklim yang menguntungkan bagi kepentingan ekonomi, perspektifnya mengenai Northwest Passage dan NSR sebagai bagian dari perairan internasional, hingga menolak keberadaan China di Arktik. Pemerintahan Trump merespon isu ini melalui proyek kapal pemecah es yang baru dalam *Polar Security Cutter*, melakukan berbagai operasi militer di wilayah Arktik dalam naungan bendera NATO, serta melangkahi Arctic Council sebagai forum antar-pemerintah tertinggi di Arktik. Pemerintahan Trump melihat peningkatan aktivitas di Arktik ini sebagai ancaman bagi kepentingan keamanan AS dan kawasan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pergeseran fokus strategi kebijakan Arktik-AS dari kerjasama dan diplomasi di era Obama II menuju kompetisi di era Trump.

AS dinilai sebagai negara Arktik yang enggan karena meskipun memiliki sumber daya sebagai kekuatan hegemon dan mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari negara Arktik, implementasi kebijakannya tidak terlihat dibandingkan dengan Russia bahkan negara non-Arktik lain seperti China. Implementasi kebijakan AS di Arktik mengalami kesenjangan antara tujuan serta implementasinya di kawasan. Kondisi ini dipengaruhi oleh perbedaan kebijakan antara Obama II dan Trump yang tidak berkelanjutan atau kontinu karena dipengaruhi oleh hak prerogatif presiden penerusnya. Adanya perbedaan kebijakan AS di Arktik antara Obama II dan Trump membuat pengaruh AS di Arktik jauh lebih rendah dibandingkan Russia. Hal ini menyebabkan kepentingan utama AS di Arktik bergantung pada keamanan kawasan atau *High Security* serta berlindung dibalik persepsi FONOP bahwa Arktik adalah bagian dari perairan internasional sehingga AS memiliki legitimasi yang kuat dalam mencapai kepentingannya di kawasan.

VI.2. Saran

Proses terbukanya Arktik akibat perubahan iklim merupakan sebuah isu krusial karena dampaknya dirasakan secara global sehingga negara sangat didorong untuk ikut terlibat dalam diskusi mengenai isu Arktik. Penulis memberikan beberapa rekomendasi, yakni:

1. Isu Arktik harus mulai mendapatkan perhatian dalam penyusunan kebijakan luar negeri suatu negara terutama Indonesia sebagai negara maritim dunia. Hal ini disebabkan karena Arktik merupakan variabel penting dalam isu perubahan iklim karena dampak mencairnya es bersifat global dan bahkan negara Asia lainnya seperti China, Jepang, India, terutama Singapura sudah masuk sebagai negara Observer di Arctic Council. Oleh karena itu, Indonesia harus memulai kampanye-nya untuk masuk sebagai negara Observer di Arctic Council karena memiliki potensi untuk menggantikan Singapura sebagai negara pelabuhan (*Port-Country*) ketika NSR sebagai jalur pelayaran Asia-Eropa terpendek mulai ramai dilalui oleh kapal-kapal seiring dengan mencairnya es di kawasan.

Letak geografis Indonesia yang strategis di antara benua Asia dan Australia serta berdekatan dengan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran tradisional dunia membuatnya berpotensi untuk menjadi negara pelabuhan dengan menjadikan Pelabuhan Patimba di Subang atau Pelabuhan Kijing di Kalimantan sebagai Hub Pelabuhan Asia-Eropa bagi kapal-kapal yang transit melalui jalur pelayaran NSR.

2. Pelibatan kelompok pakar, ahli, ilmuwan sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri dapat dipengaruhi oleh kekuatan kepentingan dari presiden, partai pendukung, individu, serta struktur pemerintahan sehingga dinamis. Kendati demikian, terdapat peran penting dari masyarakat dan publik untuk selalu menyuarakan isu Arktik dan lingkungan sebagai bagian dari prioritas kebijakan luar negeri negara.